

**LAPORAN TAHUNAN
PT. BPR SURYA UTAMA
TAHUN 2023**



Jalan Grogol Ruko Nomor 6 Grogol, Sukoharjo. Telp (0271) 626491, Email: suryautamahpr@gmail.com

I. PENJELASAN UMUM

PT. BPR Surya Utama yang berkedudukan di Ruko Grogol No.6 Jalan Raya Grogol, Sukoharjo didirikan berdasarkan Akta Notaris Pujiastuti Pangestu, S.H. No. 61 tanggal 17 April 2008 dan perubahannya No.39 tanggal 19 Februari 2009. Secara resmi mulai beroperasi tanggal 27 April 2009.

Bidang Usaha

Bidang Usaha PT. BPR Surya Utama adalah Bank didirikan dengan tujuan :

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk Tabungan dan Deposito.
2. Menyalurkan kembali kepada masyarakat melalui pinjaman atau kredit.

Perijinan dan Legalitas

Perijinan dan legalitas yang dimiliki dalam menjalankan usaha adalah sebagai berikut :

1. Akta No. 61 tanggal 17 April 2008 oleh Notaris Pujiastuti SH yang telah diubah dengan Akta Notaris No.39 tanggal 19 Februari 2009 oleh Notaris Pujiastuti Pangestu, SH.
2. Surat Persetujuan akta Pendirian Perseroan Terbatas berupa surat keputusan No. AHU – 29673.AH.01.01 tahun 2008 tanggal 2 Juni 2008 yang telah diubah dengan surat dari Direktorat Jenderal Administrasi dan Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.10.03451 tanggal 13 April 2009 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT. BPR Surya Utama.
3. Surat Persetujuan Prinsip dari Bank Indonesia No.11/137/DKBU/IDAd/Slo tanggal 25 Maret 2008
4. Surat Persetujuan Operasional dari Bank Indonesia No.11/240/DKBU/IDAd/Slo tanggal 08 April 2009
5. Nomor Pokok Wajib Pajak No. PEM-0001529ER/WPJ.32/KP.0803/2008 dari Departemen Keuangan Republik Indonesia – Direktorat Jenderal Pajak
6. Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120003930475 tertanggal 07 September 2018
7. Surat Ijin Gangguan (HO) No. 503/284/VII/2008 tanggal 4 Juli 2008 dari Kantor Pelayanan Perijinan Kabupaten Sukoharjo

Organisasi

Struktur organisasi per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut (bagan struktur organisasi terlampir)

- | | |
|----------------------|---------------------------------|
| 1. Komisaris Utama | : Rudy Hartono |
| 2. Direktur Utama | : Agusta Purnama Sigit |
| 3. Direktur YMPK | : Yohanes Hermawan Budi Sambodo |
| 4. PE Audit Internal | : Nilla Kumalasari |
| 5. PE Kepatuhan | : Agita Dyah Anggraeni |
| 6. PE Operasional | : Nurul Istiqomah |
| 7. PE Collection | : Adi Prasetyo Wibowo |
| 8. PE Funding | : Nursari Dwi Hartati |
| 9. PE Kredit | : Agung Riyadi |
| 10. Kasie Kredit | : Arief Ardiyanto |
| 11. Penagihan | : Sutardi |

12. Penagihan	: Andha Andhitya
13. Penagihan	: Barady Nalantusa
14. Administrasi Kredit	: Entas Wahyu Nugroho
15. Legal	: Margaretha Triana
16. Accounting	: Novia Sri Lestari
17. Analis Kredit	: Beny Artha Kurniawan
18. Marketing Kredit	: Zainal Arifin
19. Marketing Kredit	: Mansur Aziz
20. Marketing Kredit	: Agung Mardiyanto
21. Marketing Kredit	: Akramuzzahid
22. Marketing Kredit	: Dani Agung Baktiar
23. Marketing Kredit	: Kustanto Budi Susilo
24. Marketing Dana	: Tukino
25. Teller	: Ika Cahyawati
26. Customer Service	: Yanti Retnoningsih
27. Bagian Umum	: Reino Gumelar
28. Bagian Umum	: Aji Perdana Putra
29. Bagian Umum	: Iqnazius David Bagus Prakoso

Penerapan Good Corporate Governance (GCG)

Bank wajib menerapkan kegiatan usaha/ tata Kelola dengan berpedoman pada prinsip Keterbukaan (*transparency*), Akuntabilitas (*Accountability*), Pertanggungjawaban (*Responsibility*), Independensi (*Independency*), Kewajaran (*fairness*).

Ruang Lingkup Tata Kelola

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan badan tertinggi dalam struktur PT. BPR Surya Utama, memiliki wewenang untuk mengangkat dan/ atau mengangkat kembali para anggota Dewan Komisaris dan Dewan Direksi, menyetujui penunjukan dan / atau penunjukan Kembali Auditor Eksternal (Akuntan Publik) dan tugas-tugas lain seperti disebutkan dalam Anggaran Dasar.

Selama tahun 2023 PT BPR Surya Utama telah menyelenggarakan 3 (tiga) kali Rapat Umum Pemegang Saham.

2. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris adalah organ perusahaan yang bertanggungjawab melakukan pengawasan secara umum dan/ atau khusus sesuai dengan anggaran dasar perusahaan serta memberikan nasihat terkait pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi. Dalam memenuhi tugas dan tanggung jawab itu, Dewan Komisaris wajib bertindak secara independent.

Susunan anggota Dewan Komisaris adalah

Rudy Hartono : Komisaris Utama

Tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris secara ringkas adalah

- menjalankan tugas secara independent obyektif dan bebas dari tekanan atau kepentingan pihak manapun dengan mengutamakan kepatuhan terhadap undang-undang yang berlaku dan Anggaran Dasar Perusahaan dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi seluruh anggota Dewan Komisaris,
- Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan tanggungjawab direksi serta memastikan terselenggaranya tata Kelola perusahaan yang sesuai dengan ketentuan yang ada di setiap lini struktur organisasi
- Memberikan rekomendasi kepada RUPS untuk penggantian dan/ atau pengangkatan anggota Direksi serta apabila dipandang perlu maka Dewan Komisaris dapat memberhentikan untuk sementara waktu anggota Direksi yang terbukti melanggar ketentuan yang ada, melalaikan kewajiban dan merugikan perusahaan.

3. Direksi

Susunan Direksi PT. BPR Surya Utama per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Agusta Purnama Sigit : Direktur Utama
- b. Yohanes Hermawan Budi Sambodo : Direktur YMF Kepatuhan

Direksi secara berkala mengadakan rapat koordinasi dan rapat untuk menindaklanjuti hasil rapat Dewan Komisaris.

Tugas dan tanggungjawab Direksi secara ringkas adalah:

- Mengelola perusahaan sesuai dengan undang-undang yang berlaku, anggaran dasar perusahaan dan rencana bisnis/strategi perusahaan
- Mewakili perusahaan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian serta mengikat perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan perseroan
- Pengadaan sumber daya manusia dan Menyusun ketentuan perekrutan dampak dengan penghentian sumber daya manusia.
- Memastikan ketersediaan dan kesiapan sarana dan prasarana penunjang operasional BPR
- Memastikan kebenaran dan ketepatan waktu pelaporan terhadap Lembaga otoritas yang ada dibantu dengan Pejabat Eksekutif yang terkait.
- Menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pengurusan perseroan selama 1 (satu) tahun terakhir selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun buku perseroan ditutup>

Kepemilikan Saham Direksi, hubungan keuangan dan hubungan keluarga

1. BPR yang bersangkutan
Dewan Direksi tidak memiliki saham di PT BPR Surya Utama
2. Perusahaan lainnya
Dewan Direksi juga tidak memiliki saham di Perusahaan lain.
3. Anggota Direksi PT BPR Surya Utama tidak memiliki hubungan keuangan maupun hubungan keluarga dengan anggota Direksi lain, serta tidak memiliki hubungan keuangan maupun hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris maupun Pemegang Saham Pengendali dan Pemegang Saham.

Nama	Jabatan	Hubungan keluarga dengan						Hubungan keuangan dengan					
		Dekom		Direksi		PSP		Deko m		Direksi		PSP	
		Y	T	Y	T	Y	T	Y	T	Y	T	Y	T
Agusta Purnama Sigit	Direktur Utama		√		√		√		√		√		√
Yohanes Hermawan Budi Sambodo	Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan		√		√		√		√		√		√

Kepemilikan Saham Komisaris, hubungan keuangan dan hubungan keluarga

1. Komisaris PT. BPR Surya Utama memiliki hubungan keuangan dengan Pemegang Saham Pengendali maupun Pemegang Saham
2. Komisaris Utama PT BPR Surya Utama memiliki hubungan keluarga dan hubungan keuangan dengan Pemegang Saham Pengendali dan Pemegang Saham PT. BPR Surya Utama.

Nama	Jabatan	Hubungan keluarga dengan						Hubungan keuangan dengan					
		Dekom		Direksi		PSP		Dekom		Direksi		PSP	
		Y	T	Y	T	Y	T	Y	T	Y	T	Y	T
Rudy Hartono	Komisaris Utama		√		√	√			√		√	√	

3. Dewan Komisaris Utama PT. BPR Surya Utama memiliki saham pada PT BPR Dana Utama, sedangkan Dewan Direksi PT. BPR Surya Utama tidak memiliki saham pada BPR lain atau Lembaga Keuangan Bukan Bank & Perusahaan lainnya.

Nama	Jabatan		Bidang
Rudy Hartono	PT BPR Dana Utama	PT BPR Surya Utama	Usaha
	Pemegang Saham	Komisaris Utama	Perbankan

Jaringan Kantor

Kantor Pusat PT. BPR Surya Utama sampai dengan 31 Desember 2023 beralamat di Ruko Grogol No.6 Jalan Raya Grogol Sukoharjo dan belum mempunyai kantor cabang atau kantor kas.

1. **Kelebihan**
 a. **Kecepatan**
 b. **Keakuratan**
 c. **Keandalan**
 d. **Keamanan**
 e. **Kepraktisan**
 f. **Kejelasan**
 g. **Kejelasan**
 h. **Kejelasan**
 i. **Kejelasan**
 j. **Kejelasan**
 k. **Kejelasan**
 l. **Kejelasan**
 m. **Kejelasan**
 n. **Kejelasan**
 o. **Kejelasan**
 p. **Kejelasan**
 q. **Kejelasan**
 r. **Kejelasan**
 s. **Kejelasan**
 t. **Kejelasan**
 u. **Kejelasan**
 v. **Kejelasan**
 w. **Kejelasan**
 x. **Kejelasan**
 y. **Kejelasan**
 z. **Kejelasan**

2. Kesimpulan

No		Uraian	Ya	Tidak
----	--	--------	----	-------

1.	1	1		
2.	2	2		
3.	3	3		
4.	4	4		
5.	5	5		
6.	6	6		
7.	7	7		
8.	8	8		
9.	9	9		
10.	10	10		
11.	11	11		
12.	12	12		
13.	13	13		
14.	14	14		
15.	15	15		
16.	16	16		
17.	17	17		
18.	18	18		
19.	19	19		
20.	20	20		
21.	21	21		
22.	22	22		
23.	23	23		
24.	24	24		
25.	25	25		
26.	26	26		
27.	27	27		
28.	28	28		
29.	29	29		
30.	30	30		
31.	31	31		
32.	32	32		
33.	33	33		
34.	34	34		
35.	35	35		
36.	36	36		
37.	37	37		
38.	38	38		
39.	39	39		
40.	40	40		
41.	41	41		
42.	42	42		
43.	43	43		
44.	44	44		
45.	45	45		
46.	46	46		
47.	47	47		
48.	48	48		
49.	49	49		
50.	50	50		

	Definisi	Sand	No. Parameter	Indeks
Tingkat KPNB		100		<p>1 Risiko dari Dewan Komisaris telah melakukan pengawasan dengan baik Dewan Komisaris telah menerima dan melakukan manajemen risiko kredit yang diuraikan oleh Direksi dan melakukan evaluasi secara berkala Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap tingkat Risiko Kredit telah menerima kebijakan Manajemen Risiko Kredit sebagai dasar di laksanakan secara konsisten dan melakukan pengujian secara berkala. Direksi memiliki kemampuan yang cukup memadai untuk mengontrol tindakan yang diperlukan dalam rangka mengelola Risiko kredit BPR hanya memiliki 1 (satu) Dewan Komisaris sehingga sejak tanggal 13 Oktober 2023 Direksi telah menangkan kebijakan pengendalian SOM yang memadai dalam rangka penerapan Manajemen Risiko kredit BPR telah memiliki kebijakan atas kebijakan prosedur dan lain BPR telah memiliki kebijakan Manajemen Risiko kredit yang cukup memadai dan fokus dengan memperhatikan visi misi skala usaha dan kompleksitas bisnis serta kebijakan SOM BPR memiliki prosedur manajemen risiko kredit dan penetapan limit risiko kredit yang ditetapkan oleh Direksi namun belum sepenuhnya dilakukan secara konsisten dan belum sepenuhnya melakukan evaluasi dan pengujian terhadap manajemen risiko kredit BPR juga belum memiliki kebijakan dan prosedur mengenai pemenuhan protokol sanitasi aktivitas baru yang memiliki risiko kredit. PEK sebagai besar telah melaksanakan pengendalian internal secara menyeluruh. Sistem pengendalian internal terhadap Risiko kredit sebagian besar telah dilaksanakan dengan memadai oleh seluruh jajaran organisasi BPR.</p>

b. Risiko Operasional

	Definisi	Sand	No. Parameter	Indeks
Tingkat Risiko		2100		3 Peringkat 1, Sedang
Tingkat Risiko Inheren		2200		<p>3 BPR telah melaksanakan kegiatan usaha sesuai prosedur dan kebijakan manajemen risiko operasional, serta kebijakan yang telah sesuai dengan peraturan yang berlaku BPR masuk dalam kelompok usaha 1, dan struktur organisasi belum lengkap, karena hanya memiliki 1 (satu) Dewan Komisaris saja sejak 13 Oktober 2023 Rerang kendali relatif kecil dengan lokasi kantor yang dapat diakses dengan mudah BPR memiliki produk Tabungan, Kredit dan Deposito BPR saai ini tidak dalam proses merger dan tidak dalam proses pindah alamat kantor Jumlah SOM belum memadai, karena hanya memiliki 1 (satu) Dewan Komisaris dan tidak ada turnover karyawan untuk operasional. Kualitas SOM belum sesuai kebutuhan organisasi, sedangkan secara kuantitas SOM belum sesuai kebutuhan organisasi, sedangkan secara kualitas SOM, yaitu kompetensi sesuai yang dibutuhkan organisasi masih perlu di upgrade Masih terdapat human error dalam beberapa teknis pekerjaan tetapi tidak menimbulkan kerugian finansial TI telah sesuai dengan kondisi dan tidak sedang dalam proses perubahan besar Tidak terdapat indikasi penyimpangan (Fraud) pada BPR di setiap bagian. Terdapat faktor eksternal yang sangat mempengaruhi operasional BPR saat ini yaitu persaingan bisnis BPR.</p>

	Indeks	Seri	No. Paragraf	Isi
Tingkat KPR		330		<p>2. Direksi dan Dewan Komisaris telah melakukan pengawasan dengan baik. Dewan Komisaris telah menyiapkan atas kebijakan manajemen risiko operasional yang disusun oleh Direksi dan melakukan evaluasi secara berkala. Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap kinerja Direksi dan diungkapkan secara berkala. Direksi telah menyusun kebijakan Manajemen Risiko Operasional, dan sebagian besar melaksanakan secara konsisten, dan melakukan pengujian secara berkala. Direksi memiliki kemampuan yang cukup memadai untuk mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka mitigasi Risiko Operasional. BPR telah memiliki kesesuaian organisasi yang menangan fungsi operasional dan fungsi manajemen risiko operasional. Direksi telah menerapkan kebijakan pengelolaan SDM yang memadai dalam rangka penerapan Manajemen Risiko Operasional. BPR telah memiliki kesesuaian atas kebijakan, prosedur, dan lima BPR telah memiliki kebijakan Manajemen Risiko Operasional yang cukup memadai dan disusun dengan memperimbangan visi, misi, skala usaha dan kompleksitas bisnis serta kesesuaian SDM. BPR memiliki prosedur Manajemen Risiko operasional dan penerapan lima Risiko operasional yang ditetapkan oleh Direksi, serta sebagian besar melaksanakan prosedur Manajemen Risiko operasional dan penerapan lima Risiko operasional secara konsisten untuk seluruh aktivitas, dan melakukan evaluasi dan pengujian terhadap prosedur Manajemen Risiko operasional dan penerapan lima Risiko operasional secara berkala. BPR belum memiliki kebijakan dan prosedur mengenai penemuan produk dan/atau aktivitas baru yang memiliki eksposur Risiko operasional. PEAI telah melaksanakan pengendalian intern secara menyeluruh. Sistem pengendalian intern terhadap Risiko operasional telah dilaksanakan dengan memadai oleh seluruh jenjang organisasi BPR.</p>

c. Risiko Kepatuhan

	Indeks	Seri	No. Paragraf	Isi
Tingkat Risiko		3100		3. Tingkat 3, Sedang
Tingkat Risiko Intensi		3300		<p>3. Dalam hal pelanggaran terhadap ketentuan, BPR melanggar terkait Ketentuan BMK, BPR sebagai pelanggaran dan pelaksanaan BMK penjamin yang disebabkan oleh kelalaian atau pemerkasaan OJK. Tidak lanjut atas pelanggaran tersebut telah dilakukan secara maksimal oleh pemegang saham sehingga BPR mengklar dan Pelampauan telah terselesaikan. Terdapat perjanjian kredit atau kerja sama lain yang memenuhi syarat sah perjanjian. Tidak terdapat gugatan atau sengketa dengan kreditur yang dialami BPR akibat gugatan. Tidak terdapat kerugian yang dialami BPR karena putusan pengadilan berdasarkan hukum tetap selama periode penitatan.</p>
Tingkat KPR		3300		<p>2. Direksi dan Dewan Komisaris telah melakukan pengawasan dengan baik. Dewan Komisaris telah menyiapkan atas kebijakan manajemen risiko kepatuhan yang disusun oleh Direksi dan melakukan evaluasi secara berkala. Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap kinerja Direksi. Direksi telah menyusun kebijakan Manajemen Risiko Kepatuhan, sebagian besar melaksanakan secara konsisten, dan melakukan pengujian secara berkala. Direksi memiliki kemampuan yang cukup memadai untuk mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka mitigasi Risiko Kepatuhan. BPR telah memiliki kesesuaian organisasi yang menangan fungsi kepatuhan dan fungsi manajemen risiko kepatuhan, yaitu antara Direksi yang membawahi dan fungsi kepatuhan BPR telah menyusun kebijakan internal yang menghubungkan keterkaitan antara fungsi kepatuhan, dan telah memiliki kebijakan terkait Riset dan Penemuan BPR telah memiliki kebijakan Manajemen Risiko Kepatuhan yang cukup memadai dan disusun dengan memperimbangan visi, misi, skala usaha dan kompleksitas bisnis, serta kesesuaian SDM. BPR telah memiliki prosedur manajemen risiko kepatuhan yaitu SOP Penerapan Manajemen Risiko dan telah melaksanakan prosedur tersebut yang kemudian dilakukan evaluasi dan pengujian secara berkala. BPR belum memiliki kebijakan dan prosedur penemuan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru yang memiliki eksposur Risiko Kepatuhan. PEAI telah melaksanakan pengendalian intern secara menyeluruh.</p>

d. Risiko Likuiditas

Deskripsi	Sifat	Nilai Parameter	Analisis
Tingkat Risiko	4100	2	Rendah
Tingkat Risiko Intrens	4200	2	BPR dapat mengelola aset likuid untuk dana ide dan masih memadai untuk menutup kewajiban saat jatuh tempo. Dan sebagian besar >50% nasabah 25 depositan dan penabung terbesar merupakan nasabah lama. Secara keseluruhan pendanaan cenderung mengendap di BPR. Rasio aset likuid terhadap total aset sebesar 9.11%, BPR selalu mengelola aset likuid untuk dana ide. Dan masih memadai untuk menutup kewajiban jatuh tempo. Komposisi aset likuid terhadap kewajiban lancar sebesar 10.48% namun BPR masih memadai untuk menutup kewajiban jatuh tempo. Rasio kredit yang diberikan terhadap total dana pihak ketiga bukan bank dengan ratio 74.52%, dalam hal ini kredit berkualitas baik cukup signifikan. Komposisi 25 depositan dan penabung terbesar lebih dari 25% dan sebagian besar merupakan nasabah lama. Dana pihak ketiga dengan suku bunga sesuai ketentuan LPS dan ada sebagian dibawah LPS. Dan secara keseluruhan pendanaan cenderung mengendap di BPR. Kebutuhan pendanaan dan akses pada sumber pendanaan BPR dalam kategori memadai. BPR mampu memenuhi kewajiban dan kebutuhan arus kas pada kondisi normal maupun krisis, dan arus kas yang berasal dari aset dan kewajiban dapat saling tutup pada mayoritas skala waktu dengan baik. Akses BPR pada sumber pendanaan memadai dibuktikan dengan reputasi BPR baik, ABA yang bersifat short time (1 bulanan) yang dapat ditarik juga memadai, serta terdapat komitmen likuiditas dari pemegang saham.

Deskripsi	Sifat	Nilai Parameter	Analisis
Tingkat KPR	4300	2	Direksi dan Dewan Komisaris telah melakukan pengawasan dengan baik. Dewan Komisaris telah menyetujui atas kebijakan manajemen risiko likuiditas yang disusun oleh Direksi dan melakukan evaluasi secara berkala. Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap kinerja direksi. Direksi telah menyusun kebijakan Manajemen Risiko Likuiditas, sebagian besar melaksanakan secara konsisten, dan melakukan pengujian secara berkala. Direksi memiliki kemampuan yang cukup memadai untuk mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka mitigasi Risiko Likuiditas. BPR telah memiliki kecapaian organisasi yang menanganai fungsi likuiditas dan fungsi manajemen risiko likuiditas. Direksi telah menerapkan kebijakan pengelolaan SDM yang memadai dalam rangka penerapan Manajemen Risiko Likuiditas. BPR belum memiliki kebijakan terkait penilaian kondisi pasar, penanganan masalah risiko konsentrasi likuiditas, pengetahuan ketergantungan terhadap sumber pendanaan tertentu. BPR telah memiliki prosedur manajemen risiko likuiditas yaitu SOP Penerapan Manajemen Risiko dan sebagian besar telah melaksanakan prosedur tersebut yang kemudian dilakukan evaluasi dan pengujian secara berkala. BPR belum memiliki kebijakan dan prosedur pemberian produk dan atau pelaksanaan aktivitas baru yang memiliki eksposur Risiko Likuiditas. FEAI telah melaksanakan audit secara berkala terhadap penerapan manajemen risiko likuiditas sistem pengendalian intern. Telah diaudit oleh seluruh jenjang organisasi BPR.

e. Penilaian Tingkat Kesehatan

Kategori/Indikator	Penilaian Pada Laporan				Penilaian Pada Substansi			
	Skor (%)	Peringkat	Skor (%)	Nilai Faktor	Skor (%)	Peringkat	Skor (%)	Nilai Faktor
Profit Risiko								
Tan Kritis		3	25,00	0,75		3	25,00	0,75
Rendahnya		2	30,00	0,60		2	30,00	0,60
ROA		3	15,00	0,75		3	15,00	0,75
ESPO	4,20	3			(1,80)	3		
NM	138,48	3			114,77	3		
Fertilitas	2,40	3			1,79	3		
EFIM		3	30,00	0,90		3	30,00	0,90
Modal Intelektual Peringkat Sementara Baru	33,91	1			21,75	1		
Nilai Komposit	78,00	3			50,00	3		
Peringkat Komposit				1,00				1,00
				3				3

Analisis Kesimpulan Tingkat Kesehatan

Analisis Kesimpulan Tingkat Kesehatan: Dalam penilaian Tingkat Kesehatan, DPR termasuk Peringkat Komposit 3 (PK 3) hal ini dikarenakan kondisi DPR yang secara umum sedang mengalami kerugian dan secara risiko sistem komposit tergolong cukup tinggi selama periode waktu tertentu dan kualitas pemenuhan manajemen risiko secara komposit memadai, meskipun secara perincian masih seperi, namun masih terdapat beberapa kelemahan yang memerlukan perhatian manajemen untuk melakukan perbaikan. Dari DPR akan terus melakukan perbaikan dalam setiap faktor TKO tersebut.

Analisis Profil Risiko

Analisis Profil Risiko: DPR memetakan 4 jenis risiko yaitu Risiko Kredit, Risiko Operasional, Risiko Kesehatan, dan Risiko Likuiditas. Sesuai modal di DPR kurang dari Rp. 50 Milyar. Dari ke empat risiko tersebut penilaian DPR atas Risiko tersebut yaitu dikategorikan Sedang, sedangkan untuk Tingkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (NPMR) yaitu dikategorikan Memadai.

II. Kebijakan Akuntansi

Dasar Penyusunan Laporan

Laporan Keuangan disusun berdasarkan asumsi

1. Dasar Akrua
2. Biaya Historis kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut
3. Mata uang rupiah

Laporan keuangan disusun berdasarkan pada Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku bagi BPR yaitu Standar Akuntansi Keuangan bagi Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP), Pedoman Akuntansi bagi BPR (PA BPR), dan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode tidak langsung (indirect method) Kas dan setara kas terdiri dari Kas dan Giro pada Bank Lain.

Transaksi dengan Pihak yang mempunyai hubungan istimewa

Sesuai dengan pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.7 yang dimaksud dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah sebagai berikut :

1. Perusahaan melalui satu atau lebih perantara (intermediaries) mengendalikan atau dikendalikan oleh atau beberapa dibawah pengendalian bersama dengan perusahaan pelapor (termasuk holding companies, subsidiaries)
2. Perusahaan asosiasi
3. Perorangan yang memiliki baik secara langsung maupun tidak langsung suatu kepentingan hak suara diperusahaan pelapor yang berpengaruh secara signifikan dan anggota keluarga dekat dari perorangan tersebut (anggota keluarga dekat adalah mereka yang dapat diharapkan mempengaruhi dan dipengaruhi perorangan tersebut dalam transaksinya dengan perusahaan pelapor
4. Karyawan kunci yaitu orang-orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, dan mengendalikan kegiatan perusahaan pelapor yang meliputi anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Pejabat Eksekutif dari perusahaan serta anggota keluarga dekat orang-orang tersebut
5. Perusahaan dimana suatu kepentingan substansi dalam hak suara dimiliki baik secara langsung maupun tidak langsung oleh setiap orang diuraikan dalam point 3 dan point 4, atau setiap orang tersebut mempunyai pengaruh signifikan atas perusahaan tersebut. Ini mencakup perusahaan-perusahaan yang dimiliki anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pemegang Saham Utama dari perusahaan pelapor dan perusahaan yang mempunyai anggota manajemen kunci yang sama dengan perusahaan pelapor.

Penempatan Pada Bank Lain

Penempatan pada bank lain dinyatakan sebesar nilai nominal penyetoran atau nilai yang diperjanjikan sesuai jenis penempatan.

Kewajiban Imbalan Pasca Kerja

Sesuai SAK ETAP Bab 23 Imbalan kerja adalah seluruh bentuk imbalan yang diberikan BPR atas jasa yang diberikan oleh pekerja. Kewajiban Imbalan Kerja adalah kewajiban yang timbul dari imbalan kerja.

1. Kewajiban imbalan kerja diakui pada saat pegawai telah memberikan jasanya kepada BPR dalam suatu periode tertentu.
2. Kewajiban imbalan kerja berkurang pada saat dibayarkan
3. Kewajiban imbalan kerja jangka pendek diakui sebesar jumlah tidak didiskonto (*undiscounted amount*)
4. Kewajiban imbalan kerja jangka panjang diakui sebesar jumlah telah didiskonto (*discounted amount*)

Kredit

Kredit dinyatakan sebesar pokok kredit dan didalam kredit tidak termasuk bentuk-bentuk pembiayaan yang didasarkan pada prinsip perbankan syariah.

Penyisihan Kerugian Aktiva Produktif serta Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontijensi

Penyisihan kerugian aktiva produktif serta estimasi kerugian komitmen dan kontijensi dibentuk berdasarkan penelaahan terhadap kualitas masing-masing aktiva produktif komitmen dan kontijensi sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.

Beberapa Kebijakan/ Peraturan Internal BPR pada peridoe Tahun 2023

SOP
(STANDARD OPERATING PROCEDURE)

NO	URAIAN	NOMOR	TANGGAL
1	SOP Penerapan Manajemen Risiko	001/SOP/BPR-SU/II/2023	16 Januari 2023
2	SOP Ruang Khasanah	002/SOP/BPR-SU/II/2023	06 Februari 2023
3	Pedoman dan Tata Tertib Komisaris	003/SOP/BPR-SU/VIII/2023	28 Agustus 2023
4	SOP Fungsi Kepatuhan	004/SOP/BPR-SU/IX/2023	01 September 2023
5	SOP Literasi dan Inklusi Keuangan	005/SOP/BPR-SU/IX/2023	29 September 2023
6	SOP Penerapan Program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan Terorisme (APU & PPT) & PPSPM	006/SOP/BPR-SU/IX/2023	03 November 2023
7	SOP Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik	007/SP/BPR-SU/XI/2023	16 November 2023

8	SOP Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia	008/SOP/BPR-SU/XII/2023	22 Desember 2023
9	Peraturan Perusahaan "Standard Operating Procedure" 2023		06 September 2023
10	Job Description & Job Specification dalam Struktur Organisasi		

**SK (SURAT KEPUTUSAN)
OPERASIONAL**

NO	URAIAN	NOMOR	TANGGAL
1	SK Trget Rencana Bisnis (RBB) Tahun 2023	No. 001/SK-OPRS-SU/DIR/I/2023	02 Januari 2023
2	SK Transaksi Produk Tabungan dan Deposito tahun 2023	No. 004/SK-OPRS-SU/DIR/II/2023	01 Februari 2023
3	SK Kebijakan PPAP (Penyisihan Penghapusan Aset Produktif) Pasca Dampak Covid 19	No. 015/SK-OPRS-SU/DIR/III/2023	31 Maret 2023
4	SK Biaya Layanan Verifikasi Data Kependudukan Via Web Service NIK	No. 018/SK-OPRS-SU/DIR/III/2023	3 April 2023
5	SK Insentif Marketing Dana (Tabungan dan Deposito)	No. 025/SK-OPRS-SU/DIR/VI/2023	5 Juni 2023
6	SK Insentif Analisis Kresit	No. 027/SK-OPRS-SU/DIR/VI/2023	7 Juni 2023
7	SK Premi Kehadiran dan Uang Makan	No. 034/SK-OPRS-SU/DIR/VII/2023	7 Juni 2023

8	SK Biaya cek Intip Sertifikat Calon Debitur	No. 036/SK-OPRS-SU/DIR/VII/2023	24 Juli 2023
9	SK Transaksi Back Value	No. 037/SK-OPRS-SU/DIR/VIII/2023	01 Agustus 2023
10	SK Ketentuan Attensi	No. 038/SK-OPRS-SU/DIR/VIII/2023	14 Agustus 2023
11	SK Biaya Perjalanan Dinas	No. 039/SK-OPRS-SU/DIR/VIII/2023	28 Agustus 2023
12	SK Jadwal Seragam Kerja Karyawan	No. 045/SK-OPRS-SU/DIR/IX/2023	19 September 2023
13	SK Risk Appetite dan Risk Tolerance	No. 048/SK-OPRS-SU/DIR/IX/2023	27 September 2023
14	SK Intruksi operasi pelaksana transaksi dan otorisasi operasional	No. 050/SK-OPRS-SU/DIR/X/2023	16 Oktober 2023
15	SK Limit Approval pada core banking system ARB dan pengeluaran biaya kantor	No. 051/SK-OPRS-SU/DIR/X/2023	16 Oktober 2023
16	SK Penanggungjawab user dan password aplikasi retail BPR (ARB)	No. 052/SK-OPRS-SU/DIR/X/2023	16 Oktober 2023
17	SK Tunjangan BBM, Service, Pulsa Direksi dan Karyawan	No. 053/SK-OPRS-SU/DIR/X/2023	18 Oktober 2023
18	SK Prosedur penempatan dana di BPR Lain (Antar Bank Aktiva)	No. 054/SK-OPRS-SU/DIR/X/2023	19 Oktober 2023
19	SK Penyediaan dana pendidikan dan pelatihan SDM	No. 055/SK-OPRS-SU/DIR/XI/2023	10 November 2023
20	SK Penandatanganan cek PT. BPR Surya Utama	No. 056/SK-OPRS-SU/DIR/X/2023	16 Oktober 2023
21	SK Pengambilalihan Pinjaman (TO)	No. 057/SK-OPRS-SU/DIR/XI/2022	30 November 2023
22	SK Pemantau dan Back Up	No. 058/SK-OPRS-	30 November 2023

	Data CCTV	SU/DIR/XI/2023	
23	SK Insentif Marketing Kredit	No. 059/SK-OPRS-SU/DIR/XI/2023	14 November 2023
24	SK Petugas Yang Mensuport APU PPT & PPPSPM, Pengaduan nasabah, perlindungan konsumen	No. 060/SK-OPRS-SU/DIR/XII/2023	07 November 2023
25	SK Insentif mengikuti zoom	No. 061/SK-OPRS-SU/DIR/XII/2023	20 Desember 2023
26	SK Insentif Collection	No. 062/SK-OPRS-SU/DIR/XII/2023	27 Desember 2023
27	SK Cash In Transit	No. 063/SK-OPRS-SU/DIR/XII/2023	28 Desember 2023
28	SK Penempatan Deposito dan Tabungan Nasabah yang berhalangan datang ke kantor	No. 064/SK-OPRS-SU/DIR/XII/2023	27 Desember 2023

**SK (SURAT KEPUTUSAN)
KREDIT**

NO	URAIAN	NOMOR	TANGGAL
1	SK Pinjaman lunak untuk pengurus dan karyawan	No. 004/SK-KRD-SU/III/2023	14 Maret 2023
2	SK Call Report	No. 008/SK-KRD-SU/VIII/2023	07 Agustus 2023
3	SK Otorisasi Pencairan Kredit (Memo Pencairan Kredit)	No. 014/SK-KRD-SU/X/2023	16 Oktober 2023
4	SK Ketetapan dan ketentuan kredit	No. 017/SK-KRD-SU/X/2023	18 Oktober 2023
5	SK standart penggunaan proposal kredit oleh analis	No. 018/SK-KRD-SU/XI/2023	27 November 2023

6	SK Prosedur Kredit	No. 019/SK-KRD-SU/XI/2023	01 Desember 2023
7	SK Komite Kredit	No. 020/SK-KRD-SU/XII/2023	04 Desember 2023
8	SK Mapping Area	No. 021/SK-KRD-SU/XII/2023	27 Desember 2023
9	SK Batas Maksimum Pemberian Kredit	No. 022/SK-KRD-SU/XII/2023	29 Desember 2023

Aktiva Tetap

Aktiva tetap dibukukan menurut harga perolehan penyusutan dihitung berdasarkan metode garis lurus (*straight line methode*) dengan klasifikasi sebagai berikut :

Uraian Aktiva	Umur / Tahun
Kendaraan	4 tahun
Inventaris Kantor	1 - 8 tahun

Pengeluaran untuk pemeliharaan dan perbaikan rutin dibebankan sebagai beban pada laba rugi saat terjadinya. Sedangkan pengeluaran yang memperpanjang masa manfaat atau yang memungkinkan besar memberi manfaat perekonomian dimana yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas ditambahkan pada jumlah tercatat aktiva yang bersangkutan.

Uang Muka Pajak

Uang muka pajak merupakan jumlah pajak penghasilan yang telah dibayarkan namun belum menjadi beban periode akuntansi yang bersangkutan.

Biaya Dibayar Dimuka

Biaya dibayar dimuka diamortisasi selama masa manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus (straight line method)

Simpanan

Giro, Tabungan, dan Deposito dinyatakan sebesar nilai kewajiban bank kepada nasabah.

Pendapatan dan Beban Bunga

Pendapatan dan beban bunga diakui dengan menggunakan metode akrual basis. Pendapatan bunga atas aktiva produktif yang digolongkan sebagai non performing (kurang lancar, diragukan, dan macet) dicatat sebagai tagihan kontijensi dan diakui sebagai pendapatan pada saat diterima secara tunai (kas basis). Pendapatan provisi dan komisi kredit diakui sebagai penambah pendapatan bunga yang disusutkan setiap bulan pada tanggal transaksi.

Modal

Berdasarkan akta notaris No. 15 tertanggal 21 November 2023 yang dibuat oleh I Nyoman Cakra Negara,SH.MH. dan telah mendapatkan surat pengesahan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 23 November 2023 dengan nomor AHU-AH.01.03-0145627 tahun 2023 tentang penambahan modal setoran sebesar Rp. 1.000.000.000,-. Maka komposisi permodalan per 31 desember 2023 adalah sebagai berikut:

Dalam ribuan

No.	Nama Pemegang Saham	%
1.	Tommy Gunawan	29.45%
2.	Edy Susanto	20.57%
3.	Rudy Hartono	7.68%
4.	Soelistyawati	17.55%
5.	Titik Purwanti	24.75%
	Total	100%

III. Penjelasan Neraca

1. Kas

Kas merupakan uang tunai yang ada di kasir dan kas besar PT. BPR Surya Utama. Saldo kas per 31 Desember 2023 adalah Rp. 71.576 ribu.

2. Giro Pada Bank Lain

Giro pada bank lain adalah simpanan dana PT. BPR Surya Utama di Bank lain saldo per 31 Desember 2023 Rp. 2.474.197 ribu terdiri atas :

3. Penempatan Pada Bank Lain

Penempatan pada bank lain berupa tabungan dan deposito saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 9.116.430 terdiri atas :

Kerjasama BPR dengan bank atau lembaga lain dalam rangka pengembangan usaha yaitu dengan penempatan dana antar bank di beberapa BPR dan Bank Umum

4. Kredit yang Diberikan

Keterangan	Dalam ribuan	
	2023	2022
Kredit yang Diberikan	22.069.572	20.964.562
Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif	-468.714	-156.639
Kredit yang Diberikan bersih	21.600.856	20.807.922

Rasio	%	Penilaian
KPMM	33.91	Schat

PPAP	100.00	Sehat
NPL-BRUTO	24.99	
NPL-NETTO	26.78	
ROA	-4.28	Tidak Sehat
BOPO	138.48	Tidak Sehat
LDR	74.62	Sehat
Cash Ratio	10.48	Sehat

Strategi dan kebijaksanaan manajemen dalam usaha pengembangan BPR dijalankan dengan :

- a. Selalu memperhatikan prinsip-prinsip kehati-hatian (*prudential Banking*)
- b. Kredit disalurkan melalui analisa yang sangat hati-hati
- c. Mengikutsertakan debitur dalam program asuransi jiwa, sehingga bila terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan terhadap debitur seperti bila meninggal dunia maka resiko pelunasan sisa kredit sudah tercover oleh perusahaan asuransi
- d. Penempatan dana dalam bentuk Antar Bank Aktiva hanya di Bank Umum dan BPR yang kredibel dan sudah diketahui mempunyai reputasi yang bagus
- e. Bank menerapkan pengawasan yang cukup ketat terhadap debitur sehingga bila terjadi tunggakan angsuran akan segera dapat terselesaikan
- f. Kebijakan dalam penanganan kredit bermasalah

8. Simpanan

Tabungan

Rincian Tabungan tahun 2023

Dalam ribuan

Keterangan	2023	2022
Tabungan Surya	1.728.938	1.972.994
Tabungan Mentari	2.096.322	1.912.470
Jumlah	3.825.260	3.885.464

Suku bunga tabungan berdasarkan No. 004/SK-OPS-SU/DIR/II/2023 tentang Transparansi Produk Tabungan Dan Deposito tanggal 01 Februari 2023 sebagai berikut:

Tabungan Surya : 2,5 % p.a dihitung saldo harian

Tabungan Mentari : 1,5 % p.a dihitung saldo harian

Deposito Berjangka

Deposito merupakan saldo simpanan dari masyarakat dari pihak ketiga yang disimpan dalam bentuk deposito di BPR Surya Utama. Saldo deposito per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 26.056.907 ribu.

Rincian deposito berdasarkan jangka waktu :

Dalam ribuan

Keterangan	2023	2022
Deposito 1 (satu) bulan	25.038.937	25.415.757
Deposito 3 (tiga) bulan	845.290	1.064.723
Deposito 6 (enam) bulan	65.180	87.582
Deposito 12 (dua belas) bulan	107.500	164.162
Jumlah	26.056.907	26.732.224

Suku bunga tabungan berdasarkan No. 004/SK-OPS-SU/DIR/II/2023 tentang Transparansi Produk Tabungan Dan Deposito tanggal 01 Februari 2023 sebagai berikut:

Deposito	Periode	Bunga
5 – 10 juta	1	3.50 %
	3	3.50 %
	6	3.50 %
	12	3.50 %
10 – 50 juta	1	4.00 %
	3	4.00 %
	6	4.50 %
	12	4.50 %
51 - 100 juta	1	4.75 %
	3	4.75 %
	6	5.00 %
	12	5.00 %
≥ 100 juta	1	5.00 %
	3	5.00 %
	6	5.00 %
	12	5.00 %

Dalam pemasaran produk dana, bank menerapkan strategi :

- a. Memberikan special rate bagi nasabah dengan besaran plafon tertentu
- b. Menerapkan layanan prima (cepat dan tepat)
- c. Menerapkan layanan jemput bola atau kemudahan transaksi ditempat bagi prime customer

Laporan Keuangan Tahunan
PT. BPR Surya Utama
Posisi 31 Desember 2023
Dilaporkan pada : 29 April 2024

  
Agusta Purnama Sigit, S.KOM Y. Hermawan Budi Sambodo, SE
Direktur Utama Direktur YMF Kepatuhan